

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah pendidikan harus menjadi prioritas yang harus diselesaikan demi pembangunan bangsa. Pembangunan bangsa yang dimaksud tidak semata-mata pada pembangunan fisik, melainkan juga pembangunan *non* fisik yang berkaitan dengan pembangunan karakter manusia.

Pembangunan karakter manusia berkaitan erat dengan esensi dalam penyelenggaraan pendidikan yang pada hakekatnya bersumber dari kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya hari ini dan masa mendatang. Sehingga pendidikan harus memperhatikan kebutuhan dan perubahan-perubahan yang berlangsung di masyarakat. Namun masyarakat itu sendiri bersifat dinamis, sehingga setiap saat ada perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Perubahan dan perkembangan ini selanjutnya menentukan variasi kebutuhan anggota masyarakat itu. Dengan demikian maka seyogyanya pendidikan dapat menghasilkan output yang dapat menjawab kebutuhannya serta mampu menghadapi perubahan yang tidak ditemui selama mengikuti pendidikan di sekolah.

Sementara itu dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan,

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Undang-undang ini dibuat dengan harapan agar output dari pendidikan adalah orang yang mampu mengaktualisasikan seluruh potensinya secara optimal. Selanjutnya dengan potensi yang telah diaktualkan itu, seseorang dapat mendayagunakan serta menggali seluruh potensi alam dan lingkungannya secara produktif dan kompetitif, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhannya serta bersaing dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam masyarakat dinamis tersebut. Semua ini dapat diperoleh lewat pendidikan yang berkualitas.

Salah satu indikator pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari pencapaian siswa terhadap standar kompetensi materi yang disampaikan guru. Apabila masing-masing standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum telah dipahami oleh siswa, dengan demikian tujuan pendidikan di tingkat lembaga akan tercapai.

Sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), bahwa Standar Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan tersebut berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan merupakan arah peningkatan kualitas pendidikan secara mendasar dan holistik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta

merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik, yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran, serta mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pengetahuan yang akan dicapai selanjutnya disusun berdasarkan kelompok-kelompok mata pelajaran. Masing-masing kelompok mata pelajaran memiliki tugas yang berbeda dalam meletakkan dasar pengetahuan yang akan dicapai siswa.

Data arus siswa yang diterbitkan Balitbang Depdiknas tahun 2008/2009 mengungkapkan, untuk tingkat SD/MI (usia 7 -12 tahun) jumlah siswa terdiri dari 30.857.117 orang. Yang tidak terlayani ada sebanyak 2.431. 311 orang (7,88%). Apabila melihat retensi kotor dari anak masuk SD yang dapat melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi, hanya sebesar 11,6% pada waktu yang seharusnya. Ini berarti sekitar 88,4% tertinggal di pertahanan, baik karena tinggal kelas maupun putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan.

Angka putus sekolah maupun mengulang kelas terjadi lebih tinggi pada kelas rendah. Angka mengulang kelas di kelas I, II dan III masing-masing sekitar 14%, 7%, dan 4,5% (Depdiknas 2008/2009). Di Kota Medan, tercatat 2.609 orang yang tinggal kelas. Ini berarti rata-rata 2 orang yang mengulang setiap kelas,

sedangkan angka putus sekolah (DO) SD masih relatif tinggi yaitu 3.056 orang yang berarti rata-rata putus sekolah pada setiap SD sebanyak 7 orang.

Tingginya angka tinggal kelas dan putus sekolah tidak terlepas dari kualitas kinerja guru, terutama dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Nana Syaodih Sukmadinata (dalam Nurdin, 2005 : 3) mengatakan bahwa: "Masalah tinggal kelas dan putus sekolah dapat dipandang sebagai salah satu kegagalan sekolah khususnya guru dalam menciptakan proses belajar mengajar yang memungkinkan siswa menguasai pelajaran secara optimal".

Disisi lain, meskipun sejak tahun 2004 yang lalu Departemen Pendidikan Nasional telah mendeklarasikan diberlakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di seluruh lembaga pendidikan Indonesia, namun model pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah saat ini pada umumnya masih berbentuk pelajaran biasa yang bersifat konvensional. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang terjadi belum mampu menjadikan semua siswa menguasai standar kompetensi yang ditetapkan.

Analisis pencapaian siswa terhadap standar kompetensi yang telah ditetapkan guru pada tingkatan tertentu perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana seorang guru berupaya agar standar kompetensi yang ditetapkan dapat dicapai oleh siswa. Hal ini diperlukan untuk melihat layak tidaknya seorang guru menjadi tenaga pendidik di suatu sekolah.

Badan Penilaian dan Pengembangan (Balibang) Depdiknas memberikan data tentang guru menurut kelayakan mengajar tahun 2006/2007 sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Guru Menurut Kelayakan Mengajar Tahun 2006/2007**

No	Jenjang	Keterangan	Negeri	%	Swasta	%	Jumlah	%
1	SD	Layak	584.395	47.3	41.315	3.3	625.710	50.6
		T. Layak	558.675	45.2	50.542	4.1	609.217	49.3
		Jumlah	1.143.070	92.6	91.857	7.4	1.234.927	100.0
2	SMP	Layak	202.720	43.4	96.385	20.7	299.105	64.1
		T. Layak	108.811	23.3	58.832	12.6	167.643	35.9
		Jumlah	311.531	66.7	155.217	33.3	466.748	100.0
3	SMA	Layak	87.379	38.0	67.051	29.1	154.430	67.1
		T. Layak	35.424	15.4	40.260	17.5	75.684	32.9
		Jumlah	122.803	53.4	107.311	46.6	230.114	100.0
4	SMK	Layak	27.967	19.0	55.631	37.7	83.598	56.7
		T. Layak	20.678	14.0	43.283	29.3	63.961	43.3
		Jumlah	48.645	33.0	98.914	67.0	147.559	100.0

Sumber: Balibang Depdiknas

Dari Tabel 1.1. di atas, dapat dilihat untuk tingkat SD guru yang layak mengajar sebesar 50,6% dan guru yang tidak layak mengajar sebanyak 49,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah guru-guru SD baik negeri maupun swasta di negeri ini masih belum layak mengajar. Kenyataan inilah yang harus di perbaiki oleh semua kalangan demi perbaikan pendidikan di negara kita.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadikan tuntutan masyarakat semakin kompleks terhadap kompetensi guru. Keadaan ini

membuat guru secara terus menerus harus senantiasa berkembang dan berusaha meningkatkan standar profesionalismenya. Tuntutan terhadap kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam maupun tuntutan terhadap penguasaan kompetensi guru. Selain itu guru juga diharapkan melakukan berbagai upaya agar standar kompetensi materi yang diajarkan dapat dipahami oleh siswa. Guru dituntut tidak hanya sebagai pengajar, pendidik, dan pelatih tetapi juga dituntut untuk menyajikan informasi yang faktual dalam memperluas cakrawala pengetahuan murid.

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulumnya mengacu pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35, mengenai standar nasional pendidikan.

Desentralisasi pengelolaan pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kondisi daerah perlu segera dilaksanakan. Bentuk nyata dari desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya di satuan pendidikan.

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional pendidikan: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum

Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (Depdiknas, 2006 : 3).

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik. Pengalaman belajar lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses

pembelajaran menjadi lebih efektif. Kaitan konseptual yang dipelajari dengan sisi bidang kajian yang relevan akan membentuk skema (konsep), sehingga peserta didik akan memperoleh keutuhan dan kebulatan pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, serta kebulatan pandangan tentang kehidupan dan dunia nyata hanya dapat direfleksikan melalui pembelajaran terpadu (Williams dalam Trianto, 2010 : 194).

Namun kenyataannya, pelaksanaan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar sebagian besar masih dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran IPS masih dilakukan sesuai dengan bidang kajian masing-masing (sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi) tanpa ada keterpaduan di dalamnya. Hal ini tentu saja menghambat ketercapaian tujuan pembelajaran IPS itu sendiri yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi). Hal ini disebabkan antara lain: 1) kurikulum IPS itu sendiri tidak menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan masih terpisah-pisah antar bidang ilmu-ilmu sosial; 2) latar belakang guru yang mengajar merupakan guru disiplin ilmu yang berbeda-beda sesuai dengan kajian masing-masing sehingga sangat sulit untuk melakukan pembelajaran yang memadukan antar disiplin ilmu tersebut; 3) terdapat kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada masing-masing guru mata pelajaran untuk pembelajaran IPS secara terpadu; dan 4) meskipun pembelajaran terpadu bukan merupakan hal yang baru, namun para guru di sekolah tidak terbiasa melaksanakannya sehingga dianggap hal yang baru.

Sekolah Dasar GKPS Medan merupakan sebuah wadah pendidikan formal yang terletak di kota Medan. Letak yang strategis dan kondusif mengakibatkan banyak orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya masuk di sekolah ini. Harapan orang tua siswa agar anaknya memperoleh pendidikan bermutu harus mampu dijawab oleh sekolah sebagai wujud pengabdian terhadap pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul maka analisis terhadap pencapaian siswa terhadap standar kompetensi yang telah ditetapkan guru, serta melihat keefektifan proses pembelajaran tersebut perlu dilakukan demi peningkatan mutu pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pencapaian siswa terhadap standar kompetensi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di kelas IV SD Swasta GKPS Medan.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hal-hal yang disebut pada latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada: "Analisis Pencapaian Standar Kompetensi Siswa Dengan Model Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu Di Kelas IV SD Swasta GKPS Medan".

### C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada fokus penelitian tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencapaian siswa terhadap standar kompetensi yang ditetapkan dengan menggunakan model pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu di kelas IV SD Swasta GKPS Medan?
2. Bagaimana tingkat keefektifan proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu di kelas IV SD Swasta GKPS Medan ditinjau dari aktivitas siswa, kemampuan guru mengelola pembelajaran, dan respon siswa terhadap pembelajaran?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk melihat:

1. Sejauh mana pencapaian siswa terhadap standar kompetensi yang ditetapkan dengan menggunakan model pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu di kelas IV SD Swasta GKPS Medan.
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu di kelas IV SD Swasta GKPS Medan dilihat berdasarkan indikator: aktivitas siswa, kemampuan guru mengelola pembelajaran, dan respon siswa terhadap pembelajaran.

#### E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut.

1. Proses dan hasil penelitian ini memberikan pengalaman belajar bagi siswa dalam pencapaian standar kompetensi yang harus dikuasai pada kurun waktu yang ditentukan pada silabus.
2. Hasil dan perangkat penelitian ini dapat dijadikan bandingan bagi guru dalam upaya meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah.
3. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas yang berbeda dari subjek penelitian ini khususnya pada mata pelajaran IPS di kelas IV Sekolah Dasar.
4. Sebagai bahan masukan bagi pengelola pendidikan untuk mengambil kebijakan dalam pencapaian standar kompetensi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan guru di sekolah.
5. Pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam proses belajar mengajar.